

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:**

**Salma Nur Azizah**

**31401800156**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS  
EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:**

**Salma Nur Azizah**

**31401800156**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS  
EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(SKPD KOTA SEMARANG)**

Disusun oleh:

Salma Nur Azizah

Nim: 31401800156

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan  
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Sri Anik, SE., M.Si

NIK. 210493033

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(SKPD KOTA SEMARANG)**

Disusun oleh:

Salma Nur Azizah

Nim: 31401800156

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Juli 2023

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing**



Dr. Sri Anik, SE., M.Si

NIK. 210493033

**Penguji 1**



Maya Indriastuti

2023.08.01

08:00:23 +07'00'

Maya Indriastuti, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS

NIK. 211406021

**Penguji 2**



2023.08.02

13:50:23

+07'00'

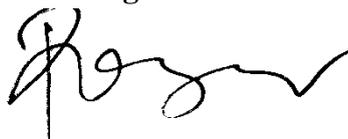
Sri Sulistyowati, SE., M.Si., Akt

NIK. 211403017

Skripsi ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Juli 2023

**Ketua Program Studi Akuntansi**



Provita Wijayanti, SE, M.Si., Akt

NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Nur Azizah

NIM : 31401800156

Jurusan : S1 - Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (SKPD KOTA SEMARANG)”** benar-benar hasil karya penelitian saya sendiri, bukan hasil adanya *plagiarism* dari karya peneliti orang lain baik sebagian atau seluruh dan tidak menggunakan karya penelitian orang lain tanpa dengan menyebutkan sumber aslinya. Skripsi ini dikutip dengan kode etik ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 30 Juni 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPORER', and '1BAKX502248505'. The signature is written in black ink over the stamp.

Salma Nur Azizah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” QS Al-Baqarah: 286

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena “*Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.*”

QS At-Thalaq: 3

Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil. “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”. QS Yusuf: 87

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada :

- Allah SWT atas karunia nya saya diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi ini
- Kedua orang tua saya yang telah mendo'akan dan memberikan *support* sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini dan terkhusus saya persembahkan untuk alm. Ayah saya yang telah meninggal. Semoga beliau diampuni segala amal dan ibadah nya, Amin...

- Saya persembahkan alm. dan almarhumah kakek serta nenek saya, saya yakin beliau sangat senang sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini dan dapat sukses di masa depan, Amin..
- Dosen pembimbing saya ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si yang senantiasa sabar memberikan arahan dan bimbingan nya.
- Untuk teman-teman saya yang telah membantu saya dalam penyusunan proposal skripsi ini, saya mengucapkan banyak terimakasih.
- Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

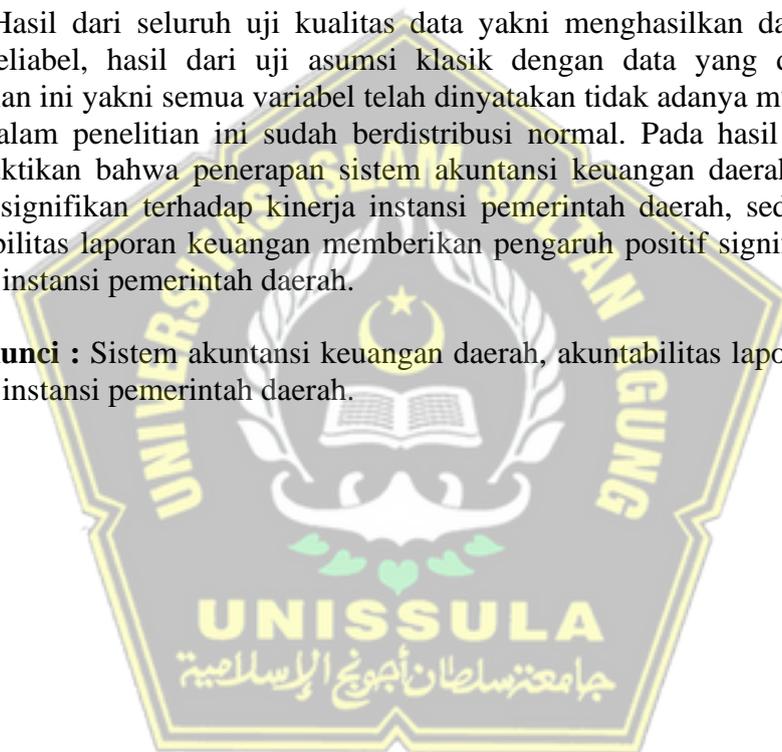


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini yakni pegawai SKPD Kota Semarang sebanyak 115 orang dan sampel sebanyak 90 orang menggunakan teknik *purposive sampling* yang sesuai dengan kriteria sampel. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*, serta jenis data yang digunakan yakni data primer dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji kualitas data dengan menggunakan *software SPSS Statistic 26*.

Hasil dari seluruh uji kualitas data yakni menghasilkan data yang valid serta reliabel, hasil dari uji asumsi klasik dengan data yang dipakai dalam penelitian ini yakni semua variabel telah dinyatakan tidak adanya multikolinieritas serta dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. Pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan untuk akuntabilitas laporan keuangan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

**Kata kunci :** Sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas laporan keuangan, kinerja instansi pemerintah daerah.

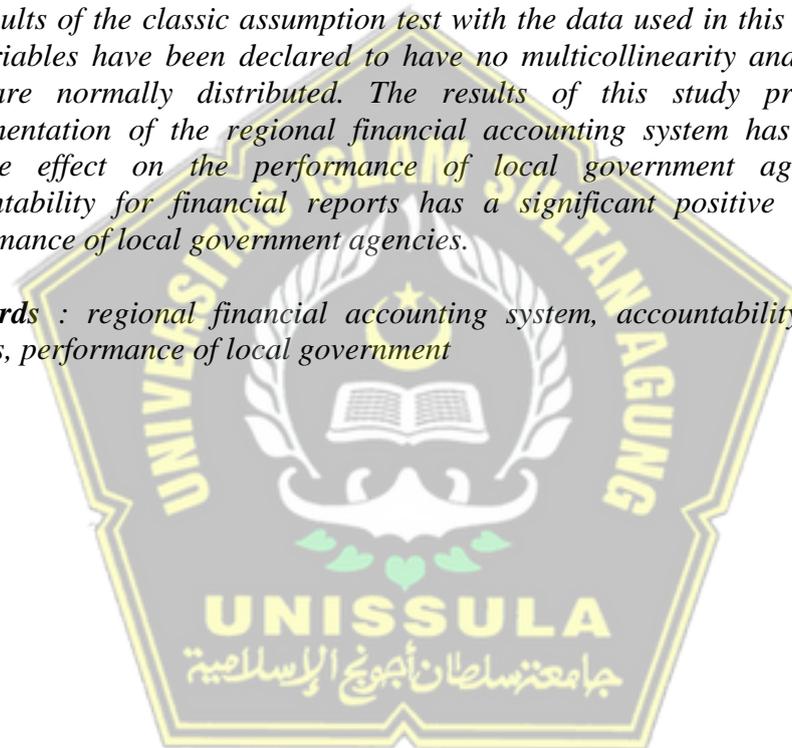


## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of regional financial accounting systems and accountability of financial reports on the performance of local government agencies in Semarang city SKPD. The population in this study were 115 SKPD employees in Semarang City and a sample of 90 people used a purposive sampling technique according to the sample criteria. The quantitative research method uses an explanatory research approach, and the type of data used is primary data using the method of distributing questionnaires at predetermined research locations. The data analysis technique used is to test the quality of the data using SPSS Statistics 26 software.*

*The results of all data quality tests are to produce valid and reliable data, the results of the classic assumption test with the data used in this study are that all variables have been declared to have no multicollinearity and in this study they are normally distributed. The results of this study prove that the implementation of the regional financial accounting system has a significant positive effect on the performance of local government agencies, while accountability for financial reports has a significant positive effect on the performance of local government agencies.*

**Keywords** : regional financial accounting system, accountability of financial reports, performance of local government



## INTISARI

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera (Fahd, 2019). Adanya perspektif keuangan tidak hanya satu-satunya cara untuk mengukur peningkatan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan. Apalagi keberhasilan instansi yang bergerak dalam sektor pelayanan publik yang tidak hanya diukur dari pencapaiannya di bidang keuangan saja. Sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat demi tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik. Keuangan daerah berkaitan dengan mencatat dan melaporkan seluruh transaksi pada instansi yang ditujukan untuk pelayanan public (Ni Made Kertiani, Ni Putu Ayu Kusumawati, 2020).

Sistem akuntansi keuangan daerah ini ditetapkan sebagai entitas pelaporan yang menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah disusun pada saat ini yakni meyakini bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan, apabila ada permasalahan dari siklus akuntansi keuangan bisa berdampak pada laporan keuangannya. Akuntabilitas laporan keuangan bagi pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti bahwa aparatur pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah uang rakyat yang ada dalam anggaran

belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.

Berdasarkan penelitian (Murniati, 2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini yang sama berdasarkan penelitian (Saifrizal, 2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Variabel selanjutnya yakni akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan penelitian (Ni Made Kertiani, Ni Putu Ayu Kusumawati, 2020) membuktikan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Pada penelitian yang sama dilakukan oleh (Arum, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan kinerja instansi pemerintah daerah.

Populasi pada penelitian ini adalah para pegawai yang sudah terdaftar pada struktur organisasi pada masing-masing SKPD sebanyak 115 orang. Dari jumlah populasi seluruh pegawai yang ada di SKPD tersebut, akan diambil populasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria sampel. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 90, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yakni *purposive sampling* serta menggunakan kriteria sampel : pegawai negeri sipil dan minimal sudah 2 tahun diangkat menjadi PNS, pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi /tata usaha keuangan pada masing-masing SKPD, memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan, pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam administrasi keuangan, serta mampu menyusun akuntansi sektor publik. Instrumen penelitian yang dipakai

pada penelitian yakni menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis menggunakan *software* SPSS Statistic 26.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya H1 yakni sistem akuntansi keuangan daerah yakni ditolak. H2 yakni akuntabilitas laporan keuangan juga diterima sehingga dari hasil hipotesis ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif tidak signifikan sedangkan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan nabi kita. Atas do'a serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (SKPD KOTA SEMARANG).”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan, rintangan serta tantangan. Adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dorongan, saran, serta pengarahan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini serta akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Provita Wijayanti, SE., M.Si., AK., CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Sri Anik, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal skripsi ini
5. Semua anggota civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah membantu memberikan ilmu kepada peneliti
6. Seluruh pihak-pihak yang sudah mau terlibat dalam proses penyusunan proposal skripsi ini

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Semarang, 30 Juni 2023

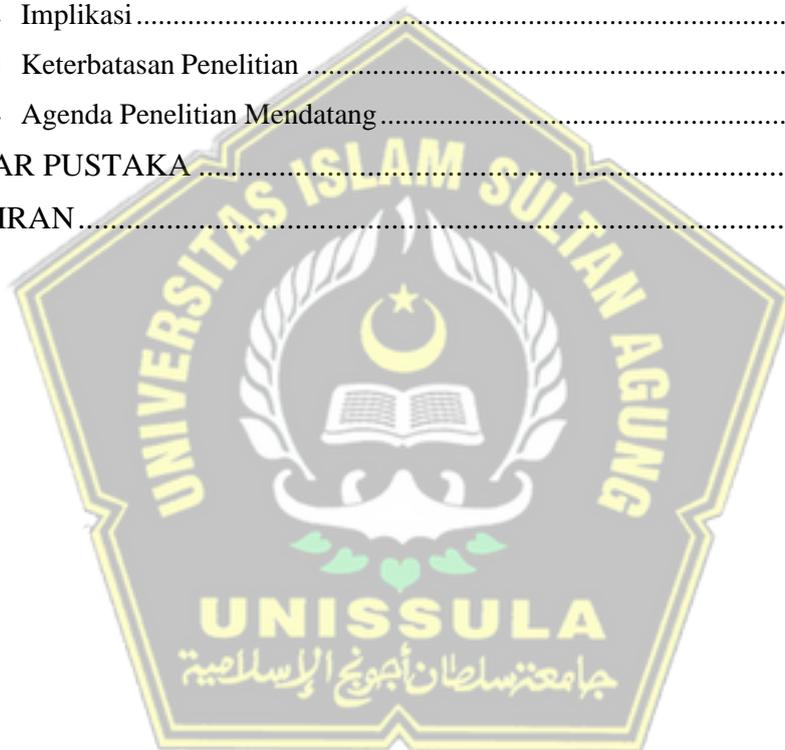
Salma Nur Azizah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	10
2.2 Variabel Penelitian.....	13
2.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	13
2.2.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan.....	16
2.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis.....	24
2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	24
2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap KinerjaInstansi	

Pemerintah Daerah .....	25
2.4.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1 Populasi .....	28
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Sumber Data & Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3.1 Sumber Data .....	29
3.3.2 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	30
3.4.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1).....	30
3.4.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (X2).....	31
3.4.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	31
3.5 Metode Analisis Data .....	35
3.5.1 Uji Kualitas Data .....	35
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	36
3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda.....	38
3.5.4 Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	39
3.5.5 Uji Hipotesis.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian .....	42
4.2 Deskripsi Identitas Responden.....	44
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian .....	45
4.3.1 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) .....	47
4.3.2 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2).....	48
4.3.3 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) .....	48
4.4 Teknik Analisis.....	49
4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data.....	49
4.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	53
4.4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	57

4.4.4 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	58
4.4.5 Hasil Uji Hipotesis .....	61
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
4.5.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang.....	62
4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang .....	63
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Implikasi .....	66
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	67
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang.....	6
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Rincian Populasi Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner .....	42
Tabel 4.2 Rincian SKPD pada Kuesioner yang dapat diolah.....	43
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi.....	44
Tabel 4.5 Kategori Nilai Indeks .....	46
Tabel 4.6 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) .....	47
Tabel 4.7 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel AkuntabilitasLaporan Keuangan (X2) .....	48
Tabel 4.8 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) .....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) .....	55
Tabel 4.12 Hasil Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	59
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	61

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Grafik Histogram (Hasil Uji Normalitas).....	54
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot (Hasil Uji Normalitas) .....	54
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot (Hasil Heterokedasitas).....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ekonomi .....	74
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	75
Lampiran 3 Data Tabulasi .....	80
Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Data .....	90
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	97
Lampiran 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	99
Lampiran 7 Hasil Uji Goodness Of Fit .....	99
Lampiran 8 Uji Hipotesis .....	101
Lampiran 9 Dokumentasi saat Penelitian.....	101



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan sebuah sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan yang ada di instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena sistem akuntansi keuangan daerah mampu mendokumentasikan data yang terkait dengan pencatatan hingga pelaporan akuntansi keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban (Husna Ade, Maryam, 2022).

Akuntabilitas laporan keuangan bagi pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti bahwa aparatur pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah uang rakyat yang ada dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Salah satu bagiandari akuntabilitas yang dapat diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah adalah dengan adanya akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah akan tercapai adalah dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang baru yang sesuai dengan paradigma *good governance* (Nurul, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah ini ditetapkan sebagai entitas pelaporan yang menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah disusun pada saat ini yakni meyakini bahwa

siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan, apabila ada permasalahan dari siklus akuntansi keuangan bisa berdampak pada laporan keuangannya. Pemerintah daerah memiliki SAKD berbentuk proses yang diawali dari pencatatan hingga pelaporan kegiatan transaksi (Hakim, 2016). SAKD juga menyajikan catatan lengkap perihal pertanggungjawaban pengelola dana yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan daerah sebagai bentuk pelaksanaan APBD.

Pada sistem akuntansi keuangan daerah, laporan dari perhitungan APBD dibentuk ketika penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya peran dari sistem tersebut pemerintah mampu menjadikannya sebagai prinsip dalam penyusunan laporan keuangan daerah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintah yaitu *good corporate governance*. Sistem akuntansi keuangan daerah mampu memberikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan serta penilaian performa pemerintah. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem keuangan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pentingnya akuntabilitas laporan keuangan daerah saat ini yakni tidak dapat dipisahkan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penerapan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif menjadi konsekuensi yang logis. Akuntabilitas dapat memberikan laporan keuangan kepada masyarakat sehingga bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tanggung jawab dari pemerintah atas seluruh aktivitas yang telah mereka

kerjakan. Sebenarnya akuntabilitas laporan keuangan sangat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Adanya akuntabilitas menjadi suatu arahan peraturan perundang – undangan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Penerapan akuntabilitas ini dalam laporan keuangan akan meningkatkan kinerja dari pemerintahan secara langsung serta menyeluruh (Auditya, Lucy Husaini, 2019).

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau pun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban sangat penting dilakukan terhadap kinerja pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan dalam pelayanan terhadap masyarakat serta melakukan evaluasi kinerja tahun yang lalu untuk menjadikan dasar dalam pedoman penyusunan tahun yang selanjutnya (Fitria Asri Kurnia, 2021).

Pengukuran kinerja instansi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan akuntabilitas. Untuk menstabilkan metode akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja keuangan yang termuat pada indikator kinerja serta target kinerja. Indikator kinerja instansi yang baik memiliki karakteristik relevan, hemat biaya, tidak ambigu serta berguna sebagai isyarat yang menunjukkan bahwa adanya masalah yang perlu segera ditindak lanjuti. Konsep akuntabilitas ini hampir digunakan oleh semua instansi termasuk lembaga pemerintahan yang mengutamakan konsep tersebut dalam hal melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan. Jika konsep

tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten maka akan menyebabkan lemahnya birokrasi serta muncul berbagai permasalahan pengendalian keuangan administrasi negara (Auditya, Lucy Husaini, 2019).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kaitan yang erat dengan kinerja instansi melalui suatu laporan keuangan pemerintahan. Di dalam informasi laporan keuangan tersebut dapat dipergunakan untuk menilai kondisi keuangan antara realisasi dengan yang dianggarkandapat membantu perwujudan terhadap hukum perundang-undangan yang terkait keuangan dan juga pengendalian keuangan pemerintahan dengan prinsip *value for money* (efektivitas dan efisien). Dengan adanya penerapan sistem tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan atas transaksi keuangan yang lebih akurat sehingga dapat memperbaiki kualitas yang diambil oleh pemakai laporan keuangan.

Pada suatu rancangan ekonomi daerah, *value for money* harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah serta anggaran daerah. Untuk mendorong dilakukannya pengelolaan dana (*public money*) yang mengacu pada konsep *value for money*. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan melaksanakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang akuntabel dan *responsif* terhadap aspirasi dan keperluan masyarakat lainnya. Akuntabilitas dan transparansi publik menjadi unsur pertimbangan utamapenerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah, akan tetapi cambuk bagi pemerintah agar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat lainnya lebih transparan (Purba, 2018).

Laporan keuangan merupakan salah satu dari banyaknya bukti yang nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah biasanya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum dari laporan keuangan yakni menyajikan informasi berupa posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan juga perubahan suatu entitas pelaporan yang dapat bermanfaat bagi pengguna dalam menganalisis ketentuan perihal alokasi sumber daya (Eliana, 2017).

Pemerintah kota Semarang sebagai pemberi amanah untuk masyarakat kota Semarang harus melakukan kewajiban bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yakni amanah dari peraturan pemerintah tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Banyaknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik dibahas (Usman, 2018).

Berdasarkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Semarang tahun 2013-2015, pemerintah Kota Semarang mengalami surplus tiap tahunnya yang mengakibatkan timbulnya SiLPA. Timbulnya SiLPA ini menunjukkan bahwa ada kegiatan yang belum terealisasi di tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini membawa dampak bahwa kinerja pemerintah Kota

Semarang berdasarkan LKPD Kota Semarang mendapatkan opini WDP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah tabel laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Semarang.

**Tabel 01 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Tahun	2013		2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan</b>	2.594.562.688.000	2.796.570.726.860	2.865.509.578.000	3.166.016.041.565	3.263.824.536.000	3.347.160.206.438
<b>Belanja</b>	3.184.087.019.000	2.473.490.609.437	3.737.509.710.000	2.957.432.639.078	4.358.328.271.526	3.200.860.096.133
<b>Surplus/Defisit</b>	(589.524.331.000)	323.080.117.423	(872.000.132.000)	208.583.402.487	(1.094.503.735.526)	146.300.110.305
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	635.424.331.000	635.457.569.772	920.179.046.000	912.721.021.842	1.136.190.735.526	1.089.735.415.117
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	45.900.000.000	45.816.665.353	48.178.914.000	48.095.579.353	41.687.000.000	41.686.874.742
<b>Surplus/Defisit pembiayaan</b>	589.524.331.000	589.640.904.419	872.000.132.000	864.625.442.489	1.094.503.735.526	1.048.048.540.375
<b>Sisa lebih pembiayaan</b>		912.721.021.842		1.073.208.844.976		1.194.348.650.680

Sumber: LKPD Kota Semarang 2013-2015

Realisasi pendapatan tiap tahunnya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Realisasi belanja pada tahun 2013-2014 lebih besar dibandingkan anggaran belanja. Realisasinya setiap tahun mengalami surplus. Realisasi penerimaan pembiayaan lebih kecil dibandingkan anggaran penerimaan pembiayaan pada tahun 2015 Tahun 2013 realisasi penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan anggarannya. SiLPA terjadi salah satunya karena realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Jadi realisasi keuangan harus sebanding dengan realisasi fisik. Kinerja dapat diukur dari tingkat realisasi dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan (Nugrahaeni Yunita, Roni, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahima

Purba, 2017), dengan menggunakan variabel yang sama. Kemudian perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menambahkan variabel akuntabilitas laporan keuangan. Tujuan dari penambahan variabel ini karena Akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah mencakup pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja *finansial* pemerintah kepadapihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Arum, 2019).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terjadinya permasalahan di dalam penyajian laporan keuangan, dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kota Semarang yang masih saja mendapatkan opini WDP 3 tahun terakhir sebelum 2016 umumnya diakibatkan karena kurangnya kepedulian berdasarkan penerapan sistem akuntansi keuangan yang setara dengan standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan tersebut sudah bisa teratasi oleh walikota Semarang sejak 17 february 2016 sudah mendatkan opini WTP. Opini WTP yang didapatkan pemerintah kota Semarang sudah dapat menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang didapatkan sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Opini tersebut menjadikan faktor kunci utama sebagai hasil tolak ukur dalam penilaian laporan

keuangan daerah kota Semarang. Hasil laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang yang mendapatkan predikat opini WTP yang bisa sebagai bentuk dari akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjelaskan laporan keuangan hasil kerja 1 tahun yang direalisasikan dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Kota Semarang
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas laporan keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD di Kota Semarang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran dari perumusan masalah yang ada diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Semarang
2. Untuk menguji pengaruh dari akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Semarang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi keuangan yang ada di kantor kedinasan, khususnya mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan pada pemerintahan daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang berdasarkan pada ekonomi islam dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, serta apa adanya. Sehingga laporan keuangan bisa disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan tidak diubah-ubah, agar berjalannya pemerintahan di daerah menjadi maju dan berkembang serta rakyatnya menjadi sejahtera karena yang dilaporkan di dalam laporan keuangan benar benar transaksi apa adanya (tidak dibuat-buat).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih principal dengan agen implementasi dari teori keagenan berupa perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara principal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem* (Edowati, Mikael, Herminawati, 2021). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Priscilla, Taufeni, 2021). Pelaku pertama masyarakat yang menjabat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai kepala daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pemerintah Daerah sendiri berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dapat dikatakan sebagai manajer manajemen (*manage of management*).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah yang bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintahan yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal atau masyarakat. Masyarakat menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut sebagai salah satunya dapat dilihat dari

laporan keuangan dan pelayanan terhadap masyarakat yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Darmawan, 2020). Kesimpulannya yaitu apabila kinerja pemerintahan baik, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

### **1. Hubungan Teori *Agency* Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Sehingga dengan adanya desentralisasi dalam keuangan daerah diharapkan daerah bisa mandiri ketika mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adanya desentralisasi di Indonesia juga menyebabkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Desentralisasi fiskal yang tergambar dalam rasio keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi, karena adanya hubungan pendelegasian wewenang. Penelitian ini akan menghubungkan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dengan menghubungkan dengan teori keagenan.

## **2. Hubungan Teori *Agency* Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah**

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam akuntansi merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi yang logis mengenai adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

## **3. Hubungan Teori *Agency* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan interaksi antara agen dan principal. Agen adalah pihak yang menerima perintah dan prinsipal menjadi pihak pemberi perintah, pengawas, memberikan nilai dan masukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas oleh agen. Masyarakat di era keterbukaan saat ini semakin kritis menanggapi tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik sering terjadi dan menimbulkan ketidak harmonisan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada sistem pengukuran kinerja pemerintah yang bersifat formal, yang dapat memberikan informasi tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan teori-teori yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskannya. Hubungan agen dan prinsipal di sektor pemerintah harus tetap pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasari peraturan-peraturan yang

berlaku. Hal tersebut untuk mengurangi perilaku oportunistik antara agen dan prinsipal.

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu didalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah (PEMDA) dapat dikatakan sebagai seorang agen dan publik, dan masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai *principal* yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian mekanisme yang bisa dilakukan secara manual yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan keuangan yang dilakukan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi serta *disclosure* atas kinerja *financial* pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi serta akuntabilitas publik. Ada juga indikator – indikator yang bisa digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yakni tingkat keakuratan, tingkat kelengkapan, *realtime*, kesesuaian pencatatan, tingkat pengklasifikasian, tepat waktu (Hakim, 2016). Sistem akuntansi keuangan daerah yang berlangsung efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Di dalam sistem akuntansi keuangan daerah tersebut ditentukan oleh entitas pelaporan serta entitas akuntansi yang menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah ini dikerjakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (Fitria Asri Kurnia, 2021).

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yakni aktivitas jasa untuk mempersiapkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Dalam mengelola keuangan negara serta daerah, pemerintah lebih memprioritaskan kepada suatu sistem yang diperlukan untuk pengelolaan dana. Menurut Erlina (2015), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri atas proses pencatatan, penafsiran dalam hal pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang ada. Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk dengan beberapa tujuan yaitu akuntabilitas, manajerial, pengawasan, penyedia informasi anggaran. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 3 metode pencatatan yaitu:

- Metode pencatatan *single entry* yaitu metode pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat hanya sekali. Transaksi yang akan mempengaruhi bertambahnya kas di sisi penerimaan dan berkurangnya kas di sisi pengeluaran.
- Metode pencatatan *double entry* yaitu metode pencatatan transaksi ekonomi menjurnal. Dalam melakukan pencatatan ini harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
- Metode pencatatan *triple entry* yaitu metode pencatatan transaksi ekonomi dengan menggunakan sistem *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sehingga metode pencatatan ini akan berefek pada sisa anggaran.

Pengaturan Sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi pemerintah, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan gubernur/walikota. Sistem akuntansi keuangan daerah seharusnya meliputi prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap / barang milik daerah serta selain kas (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007). Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik (Hesti, 2016). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan Lingkup akuntansi pemerintah meliputi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah (PEMDA) atau biasa disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

Berdasarkan pendapat beberapa peneliti dan peraturan maka dapat disimpulkan bahwa Salah satu cara yang nyata untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yakni penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik serta menyusun nya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan baik, maka akuntabilitas keuangan daerah nya pun akan semakin meningkat. Salah satu tujuan dari sistem akuntansi keuangan yang akurat sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik serta dapat digunakan oleh pihak eksternal. Manfaat dilakukannya sistem akuntansi keuangan daerah yakni

melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### **2.2.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan (Lewerissa & Handayani, 2018).

Menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2010, laporan keuangan yakni laporan yang tersusun tentang posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik yang memiliki hak untuk

mengetahui laporan keuangan pemerintah, adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk setiap para pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang memudahkan untuk memberikan gambaran posisi-posisi keuangan kewajiban serta ekuitas pemerintah daerah. Salah satu tujuan serta peran pelaporan keuangan pemerintah daerah yakni menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (kepala daerah dan DPRD) dalam hal pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetaring reports*), laporan perusahaan serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan perusahaan terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan arus kas (LAK).

Menurut Erlina (2015), Akuntabilitas itu sendiri meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh akuntabilitas yang dilakukan tidak sekedar aktivitas perusahaan saja tapi juga laporan keuangan pemerintah harus bisa memberi informasi yang dibutuhkan para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Menurut Winwin dan Abdullah bahwa ciri laporan keuangan yang berkualitas yakni output berwujud informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu faktor kualitas informasi, dan organisasi yang terdiri dari pelatihan akuntansi, teknologi informasi, integritas, kontinuitas serta budaya organisasi. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menjelaskan kinerja perusahaan. Laporan

keuangan pemerintah daerah disusun dalam bentuk serta format yang memudahkan untuk memberikan gambaran posisi–posisi laporan keuangan kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas harus dilaksanakan oleh semua entitas pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik/akuntabel.

Berdasarkan pendapat dan peraturan pemerintah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada pengguna keuangan serta transaksi–transaksi ekonomi yang ada oleh suatu entitas perusahaan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dalam pelaksanaan otonomi serta operasional pemerintah daerah.

### **2.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Kinerja instansi pemerintah daerah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber

daya yang telah diberikan, melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi secara periodik. Wujud dari sumber daya ini biasanya dapat berupa sumber daya manusia (SDM), dana, serta metode kerja. Sedangkan sumber daya alam konteks negara berupa aparatur pemerintah, kekuasaan hukum dan juga politik. Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh kepalalembaga administrasi negara harus berdasarkan prinsip-prinsip:

- Adanya komitmen dari pimpinan staf instansi yang bersangkutan
- Jujur, objektif, transparan dan juga akurat
- Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan

Kinerja instansi pemerintah yang baik memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. Kinerja pegawai akan memberikan kontribusi pada kinerja organisasi. Pegawai yang memiliki motivasi kerja akan membuat pilihan terbaik sehingga penilaian kinerja dapat ditentukan oleh hasil kegiatan dari sisi sumber daya manusia. Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu rencana strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja para staf instansi (Noviyana & Pratolo, 2018). indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Pengukuran kinerja merupakan

suatu proses menetapkan indikator-indikator dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas. (Nasir & Oktari, 2019).

Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Tujuan penyusunan LAKIP yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun.

Berdasarkan pendapat beberapa peneliti dan peraturan pemerintah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja yakni kunci dari tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan suatu organisasi public. Proses siklus akuntansi sektor publik menjadi penentuan penilaian keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan.

Akuntabilitas dipercaya dapat memperbaiki kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik serta menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Kinerja pemerintahan dapat diukur dengan cara mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan mengecek laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode. Sedangkan kinerja non keuangan dilakukan dengan menilai target pencapaian kinerja pemerintah serta pelayanan kepuasan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 01 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Isty Riani (2015)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	Variabel Independen: Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan, dan Sistem Pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja instansi</li> <li>• Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi</li> <li>• Sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi</li> </ul>
2	Rahima Br. Purba (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Variabel Dependen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Akuntansi keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.</li> <li>• Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan</li> </ul>

		Kabupaten Tanah Datar	Akuntabilitas Kinerja Instansi	<p>Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.</li> </ul>
3.	Fitri Asri Kurnia (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Bandung Barat)	<p>Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik pula.</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dinas Kabupaten Bandung Barat, artinya semakin baiknya pencatatan dan pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka hal tersebut akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>

4.	Ristika Arumsari (2017)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas SKPD Kota Cimahi)	<p>Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>
5.	Welly Surjono, dan Nova Roslina Virdaus (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	<p>Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Akuntabilitas Laporan Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik.</li> <li>• Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan sangat baik.</li> <li>• Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas laporan Keuangan Daerah.</li> </ul>
6.	Novita Puri Ardiyani (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah	<p>Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>• Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja</li> </ul>

		Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>instansi pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> </ul>
7	Utami Puji Lestari, Mutoriogh (2020)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal)	Variabel Independen : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, <i>Good Governance</i> (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah</li> <li>• Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan</li> <li>• Transparansi Tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah</li> <li>• Good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah</li> </ul>

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu

## 2.4 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan prosedur keuangan yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dengan metode maupun komputerisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan dan pertanggungjawaban kepada publik. Lingkup akuntansi pemerintah meliputi pemerintah pusat dan

akuntansi pemerintah daerah atau biasa disebut akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah itu terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Karena akuntansi keuangan daerah salah satu jenis akuntansi, maka terdapat pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Jika sistem akuntansi keuangan daerah nya baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang nanti nya dapat mempengaruhi kinerja instansi nya (Purba, 2018).

Berdasarkan penelitian Novita Puri Ardiyati (2019) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya sesuai dengan hasil penelitian Welly Surjono & Nova Roslina Firdaus (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif pada Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari semakin tinggi akuntabilitas keuangan daerah pada instansi pemerintah daerah maka akan semakin baik juga kinerja pada suatu daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat membantu untuk membuat laporan keuangan instansi pemerintah menjadi lebih baik, ini akan memberi dampak meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah

**H1: Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah**

#### **2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang –

undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Penerapan akuntabilitas keuangan secara efektif akan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja suatu daerah. Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dapat digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan mampu menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian Binawati (2015), menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah daerah. Penerapan akuntabilitas keuangan secara efektif akan mendukung terciptanya kinerja suatu daerah. Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu sudah digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan mampu menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat pemakai lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, tidak hanya keuangan saja tapi juga kinerja yang sudah disetujui antara eksekutif daerah & legislatif daerah.

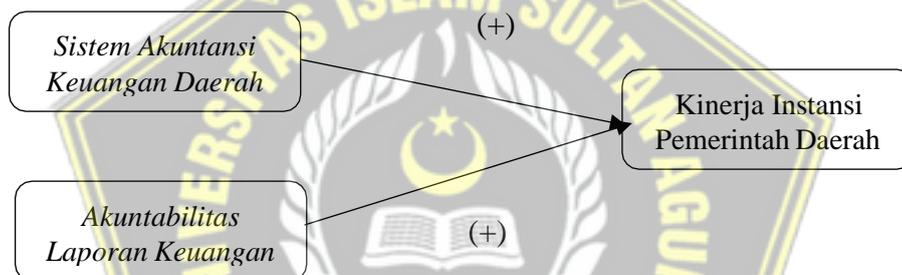
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isty Riani (2015) Semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas

tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik.

## **H2: akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah**

### **2.4.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan) dan variabel dependen (kinerja instansi pemerintah daerah).



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanasi (*Explanatory Research*). Menurut Sugiyono (2013:6) penelitian eksplanasi (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Febriani, 2017).

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan daerah generalisasi mencakup suatu objek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipahami lalu kemudian dapat diambil kesimpulan atas objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh SKPD di Kota Semarang dan yang digunakan sebagai populasi pada penelitian ini adalah para pegawai yang sudah terdaftar pada struktur organisasi pada masing-masing SKPD. Dari jumlah populasi seluruh pegawai yang ada di SKPD tersebut, akan diambil populasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria sampel yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1 Rincian Populasi Penelitian**

SKPD Kota Semarang	Jumlah
Dinas Perdagangan Kota Semarang	8
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	8
Dinas Kesehatan Kota Semarang	9
Dinas Sosial Kota Semarang	25

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	15
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	20
Dinas Pendidikan Kota Semarang	14
Dinas Kelautan & Perikanan Kota Semarang	16
<b>Total</b>	<b>115</b>

Sumber: Data populasi dari Instansi SKPD Kota Semarang

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan komponen dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk lebih memfokuskan pemilihan sampel yang benar benar mewakili jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yakni *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan dengan beberapa pertimbangan untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 90 orang dari jumlah populasi sebanyak 115 orang. Adapun ketentuan kriteria yang dipakai pada penelitian yakni:

1. Pegawai Negeri Sipil dan minimal sudah 2 tahun diangkat menjadi PNS.
2. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada masing-masing SKPD.
3. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam administrasi keuangan,serta mampu menyusun akuntansi sektor publik.

## 3.3 Sumber Data & Metode Pengumpulan Data

### 3.3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari tempat objek penelitian. Data primer yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada para karyawan yang berada di SKPD Kota Semarang. Kuesioner yang dibagikan kepada para karyawan perlu menjawab dengan cara menandai jawaban yang disediakan oleh peneliti.

### **3.3.2 Metode Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2017), metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara kuesioner.

#### **Kuesioner**

Kuesioner yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis ataupun melalui link kepada para responden untuk mendapatkan jawaban, yang biasanya dibagikan secara langsung ataupun dibagikan melalui internet. Jenis angket pertanyaan ada 2 yakni angket tertutup dan angket terbuka. Angket terbuka yakni angket yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, sedangkan angket tertutup yakni dimana peneliti memberikan pilihan jawaban untuk dijawab. Dengan kuesioner kita juga bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Pengumpulan datanya juga relatif cepat karena peneliti tidak perlu hadir pada saat pengisian kuesioner. Hal ini berguna untuk meneliti populasi besar, di mana wawancara bukanlah pilihan yang praktis.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)**

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial

pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya akuntabilitas. Menurut (Sumiati 2019), tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan & pelaporan. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah, peneliti mengukur dengan instrument 6 butir pertanyaan dengan 3 indikator yakni:

1. Pencatatan
2. Penggolongan
3. Pelaporan

#### **3.4.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)**

Akuntabilitas dijabarkan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya pada unit pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Indikator akuntabilitas yakni:

- a. Integritas keuangan, menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.
- b. Pengungkapan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan, penyajian laporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

#### **3.4.3 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Kinerja instansi pemerintah daerah yakni gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai bentuk dari visi, misi, serta strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja pemerintah daerah termasuk ke dalam sebuah capaian atau hasil – hasil pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan – tujuan serta sasaran kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas. Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah:

- a. Indikator input: Jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan.
- b. Indikator hasil: Produktivitas para karyawan & pegawai.
- c. Indikator manfaat: tingkat kepuasan masyarakat & tingkat partisipasi masyarakat.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel Dependen	Definisi Konsep	Indikator	Sumber
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya akuntabilitas. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan</li> <li>b. Penggolongan</li> <li>c. Pelaporan</li> </ol>	(Esha Selvia Ayu Sella, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti, 2020)

		mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.		
2	Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Akuntabilitas dijabarkan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai pada unit pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Integritas Keuangan, menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah</li> <li>b. Pengungkapan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan</li> <li>c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Penyajian Laporan Keuangan</li> </ul>	(Novita Putri Ardiyani, Enita Binawati, 2019)
<b>No</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Definisi Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>

1	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	<p>Kinerja instansi Pemerintah daerah yakni penjabaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai bentuk dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja pemerintah daerah termasuk ke dalam seluruh capaian /hasil – hasil pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan – tujuan serta sasaran kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas.</p>	<p>a. Indikator input: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan.</p> <p>b. Indikator hasil: Produktivitas para karyawan / pegawai.</p> <p>c. Indikator manfaat : tingkat kepuasan masyarakat &amp; tingkat partisipasi masyarakat.</p>	(Arjuna, Ani Mustika Putri, 2019)
---	------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yakni proses analisis data yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti untuk menjadi sumber penelitian sehingga data yang dianalisis dapat dijelaskan nantinya, serta dapat membantu peneliti dalam memahami dan dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji goodness of fit.

#### 3.5.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kualitas data yang diperoleh melalui pemakaian alat ukur yang dilakukan evaluasi dari uji reliabilitas dan uji validitas untuk memahami akurasi dan konsistensi data masing-masing yang dilakukan pengumpulan dengan pengukuran.

##### a. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2017), menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Penelitian dikatakan valid atau tidak apabila pernyataan dari kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang telah diisi oleh kuesioner. Pengujian validitas dengan menggunakan SPSS, nilai validitas ditunjukkan pada kolom *corrected item*). Jika angka korelasi lebih besar daripada ( $r$ -hitung,  $r$ -tabel) maka akan dapat dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar item digunakan untuk analisis selanjutnya, sebaliknya jika item pertanyaan tidak valid maka tidak dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan  $r$ -tabel dan  $r$ -hitung, dimana pernyataan dikatakan valid

jika  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ . Jika nilai **validitas** setiap jawaban yang didapatkan ketika memberikan daftar pertanyaan nilainya lebih besar dari 0,3 maka item pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

### **b. Uji Reliabilitas**

Secara etimologis, reliabilitas berasal dari kata *reliability* yang apabila diurai terbentuk dari kata *rely* yang berarti percaya dan bisa juga *reliable* yang artinya bisa dipercaya. Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai 0,6 maka instrumen yang digunakan reliabel. (Purba, 2018) Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha*. Uji signifikan dilakukan pada taraf  $\alpha = 0,05$ .

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS karena itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga, tidak semua tes penerimaan klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi linier misalnya uji multikolinieritas tidak dilakukan dalam analisis regresi linier sederhana dan uji

autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Untuk analisis regresi linier yang mana nilai variabel tertentu akan dihitung dan tidak ada tes penerimaan klasik yang harus dilakukan. Misalnya nilai pengembalian saham dihitung menggunakan model pasar atau model yang disesuaikan pasar. Pengembalian yang diharapkan dapat dihitung menggunakan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji untuk asumsi klasik. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik Histogram dan grafik P-P Plots. Pada uji grafik, data yang memiliki pola statistik lonceng pada diagram histogram dan pada grafik P-P Plots titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal merupakan data yang baik. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal (Putri & dan Enita, 2019).

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbedakan disebut heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu dapat dilihat dari penyebaran titik-titik pada grafik plot yang harus menyebar di atas dan dibawah angka 0 dalam sumbu Y dan penyebaran titik-titik menunjukkan pola yang tidak jelas.

### c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Uji multikolinieritas tidak mengurangi kekuatan prediksi secara simultan, namun mempengaruhi nilai prediksi dari sebuah variabel bebas. Nilai prediksi sebuah variabel bebas disini adalah koefisien beta. Oleh karena itu, sering kali kita bisa mendeteksi adanya multikolinieritas dengan adanya nilai standar error yang besar dari sebuah variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas yang baik adalah apabila nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , yang dapat diartikan tidak terjadinya multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1.

### 3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan uji yang menyangkut lebih dari satu

variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila variabelbebasnya hanya satu, maka uji/analisis regresinya dikenal dengan regresi linier sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari pada satu, maka uji/analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Pada analisis regresi linier berganda, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan umumnya:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
$\alpha$	= Konstanta ( <i>intercept</i> )
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel bebas
e	= Standard error
X <sub>1</sub>	= Sistem akuntansi keuangan daerah
X <sub>2</sub>	= Akuntabilitas laporan keuangan daerah

#### 3.5.4 Uji *Goodness of Fit*

Uji *Goodness of Fit* yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua uji, yaitu uji koefisien determinasi atau (R<sup>2</sup>), dan uji hipotesis simultan atau Uji F.

##### 1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Signifikan yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam

menaksir nilai aktual. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dan melihat nilai signifikansinya. Nilai F tabel didapat dari nilai *degree of freedom*  $df_1$  dan  $df_2$ . Nilai  $df_1$  (pembilang) adalah jumlah variabel independen ( $k-1$ ) dan nilai  $df_2$  (penyebut) diperoleh dari  $n - k$ . Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  dan nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaliknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai *adjusted*/ $R^2$  (Antika, 2020).

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Sujarweni (2015:164) “Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X)”. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared* (Ghozali I. , 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square ( $R^2$ ) pada tabel Model Summary. Semakin tinggi nilai  $R^2$  berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai  $R^2$  semakin

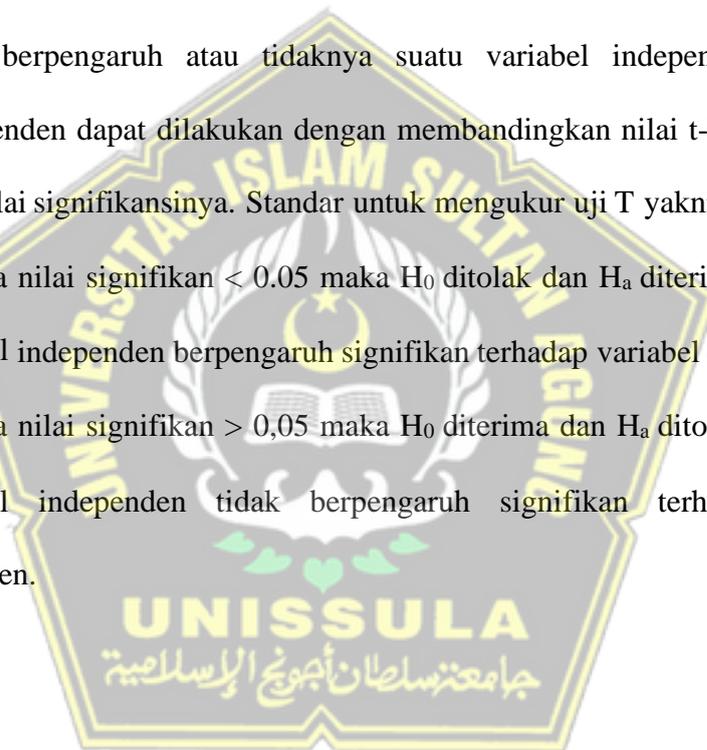
kecil, artinya kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

### 3.5.5 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Metode uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji signifikan parameter individual (uji T). Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dan nilai signifikansinya. Standar untuk mengukur uji T yakni:

- a. Apabila nilai signifikan  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, itu berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, itu berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan jawaban dari responden yang diberikan kepada pegawai dalam kuesioner penelitian ini pada beberapa instansi pemerintah daerah Kota Semarang. Sebanyak 115 kuesioner yang akan disebar ke instansi pemerintah daerah Kota Semarang sebagai populasi berdasarkan rincian seluruh SKPD Kota Semarang yang dimulai dari tanggal 27 Maret 2023 – 10 April 2023.

Rincian dari pengembalian kuesioner tersajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut:

**Tabel 01 Hasil Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	115	100
Kuesioner yang tidak kembali	25	22
Kuesioner yang cacat	0	0
Kuesioner kembali	90	78
Kuesioner yang dapat diolah	90	78
<b>N=115</b>		
<b>Responden Rate = <math>(90/115) \times 100\% = 78\%</math></b>		

Sumber: Data Kuesioner yang disebar, 2023

Pada populasi penelitian sudah ditetapkan perhitungan populasi sebanyak 115 responden untuk dilakukan penyebaran kuesioner. Dari hasil penyebaran yang ada pada tabel 4.1, dapat menunjukkan bahwa terdapat kuesioner yang kembali sebanyak 90 kuesioner atau 78% dari jumlah kuesioner, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 25 kuesioner atau 22% dari jumlah kuesioner dikarenakan pegawainya itu tidak semuanya ada saat menyebarkan kuesioner dan pada saat itu responden ada keperluan jadi tidak bisa mengisi dengan ada waktu yang singkat sehingga

peneliti tidak bisa menyebarkan kuesioner kembali dan kuesioner yang cacat sebanyak 0 kuesioner atau 0% dari jumlah kuesioner. Jadi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 61 kuesioner 78% dari jumlah kuesioner.

Dari tabel 4.1, berikut ini adalah rincian hasil SKPD yang ada di kuesioner, yang dapat diolah sebagai berikut:

**Tabel 02 Rincian SKPD pada Kuesioner yang dapat diolah**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Sosial Kota Semarang	25	28
2	Dinas Tenaga Kerja Semarang	15	17
3	Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	20	22
4	Dinas Pendidikan Kota Semarang	14	16
5	Dinas Kelautan & Perikanan Kota Semarang	16	17
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Data yang diperoleh dari tabel 4.2 tabel diatas, merupakan hasil data dari menyebarkan kuesioner pada rincian populasi penelitian di tabel 4.1. Hasil data yang diperoleh yakni 5 SKPD dengan jumlah sampel 90. Data tersebut diperoleh melalui google form dan lembaran kuesioner yang dibagikan dengan cara mendatangi kantor dinas yang sebelumnya sudah diberikan surat ijin penelitian terlebih dahulu. Kemudian menunggu balasan surat konfirmasi boleh atau tidak nya untuk membagikan kuesioner nya di kantor dinas tersebut.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kantor dinas dengan responden terbanyak yaitu Dinas Sosial Kota Semarang sebesar 25 orang atau 28%. Sedangkan kantor dinas dengan responden paling sedikit yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang sebesar 14 orang atau 16%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang ikut berpartisipasi dalam kuesioner ini paling banyak adalah 25 orang pada

setiap kantor dinas.

#### 4.2 Deskripsi Identitas Responden

Identitas dari 90 responden dapat diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin serta posisi/jabatan. Berikut ini dijelaskan mengenai karakteristik para responden yang sudah membantu mengisi kuesionernya.

Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	42	46,67
2	Perempuan	48	53,33
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>100</b>

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 42 orang atau sebesar 46,67%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang atau sebesar 53,33%. Hal ini menunjukkan rata-rata responden yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Data responden berdasarkan jabatan/ posisi dapat ditunjukkan sebagai pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi**

No	Jabatan/Posisi	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Bagian Keuangan	5	6
2	Staff Administrasi Keuangan	6	7
3	Staff Analisis aplikasi & pengelola sistem akuntansi	10	11,10
4	Staff Bid. Akuntansi dan sistem informasi	10	11,10

5	Staff Bid. Penatausahaan Keuangan	10	11,10
6	Sub bag. Analis Keuangan Pusat & Daerah	7	8
7	Staff Public Accounting	9	10
8	Sub Bag. Pengolah Data & Informasi Keuangan	10	11,10
9	Staff Bidang Pelaporan Keuangan	10	11,10
10	Staff Bid. Analisa Keuangan	5	5
11	Staff Keuangan	5	6
12	Staff Administrasi Umum	3	3
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden yang mempunyai posisi sebagai staff audit keuangan, bendahara gaji, bendahara pengeluaran, dan pengelola dana sebesar 10 orang atau 11,10%. Sedangkan responden yang mempunyai posisi sebagai staff administrasi keuangan hanya sebesar 3 atau 3% saja. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini adalah responden yang mempunyai posisi sebagai staf pengelola keuangan daerah.

#### 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Nama-nama kantor dinas yang menjadi sampel dalam penelitian telah dijabarkan pada halaman sebelumnya. Sebelum membahas pembuktian hipotesis, secara deskriptif akan dijelaskan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Rofifah, 2020).

Deskripsi variabel dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan dari responden yang mengisi kuesioner tentang “Dampak Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Semarang”. Penelitian tersebut berada dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Adanya deskripsi tersebut bisa memudahkan dalam memberikan penjelasan mengenai masing-masing indikator per variabel dari tanggapan yang sudah diberikan oleh responden untuk mengelompokkan jawaban penelitian.

Indeks kuesioner untuk jawaban responden yang diambil dari skala likert ada 5 skor yakni:

- 1: Sangat Tidak Setuju
- 2: Tidak Setuju
- 3: Netral
- 4: Setuju
- 5: Sangat Setuju

Kategori tanggapan responden dirumuskan dengan rentang skala likert sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{skala tertinggi} - \text{skala terendah}}{\text{Skala tertinggi}}$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{5-1}{5}$$

$$\text{Rentang Skala} = 0,8$$

Maka kategori skala yang ditetapkan adalah:

**Tabel 4.5 Kategori Nilai Indeks**

Nilai Indeks	Kategori
1 – 1,80	Sangat Rendah / Sangat Buruk
1,81 – 2,60	Rendah / Buruk
2,61 – 3,40	Sedang / Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi / Baik
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi / Sangat Baik

#### 4.3.1 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan nilai jawaban responden terhadap adanya variabel sistem akuntansi keuangan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 06 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)**

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X1										$\Sigma$ Skor	Mean
	STS		TS		N		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X1.1	13	13	12	24	17	51	24	96	24	120	304	3,38
X1.2	11	11	16	32	13	39	25	100	25	125	307	3,20
X1.3	9	9	11	22	14	42	24	96	32	160	329	3,66
X1.4	22	22	18	36	13	52	13	52	24	120	217	2,41
X1.5	13	13	12	24	15	45	24	96	26	130	308	3,42
X1.6	9	9	7	14	19	57	28	112	26	130	322	3,58
X1.7	10	10	15	30	19	57	22	88	24	90	275	3,06
X1.8	19	19	8	16	11	33	18	72	34	170	310	3,44
X1.9	6	6	12	24	12	36	35	140	25	125	331	3,68
X1.10	14	14	23	46	15	45	16	64	22	110	279	3,10
X1.11	16	16	16	32	14	42	14	56	30	150	296	3,29
X1.12	21	21	12	24	17	51	21	84	19	95	275	3,06
X1.13	4	4	14	28	13	36	27	108	32	160	336	3,73
X1.14	10	10	11	22	14	42	37	148	18	90	312	3,47
<b>Rata-Rata Variabel X1</b>												<b>3,30</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4.6 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut responden yang memberikan pendapatnya melalui kuesioner mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada kota Semarang yakni masih berdampak kurang baik dalam pencatatan laporan keuangan. Pencatatan tersebut belum berdampak baik dan masih kurang bagi kinerja instansi pemerintah daerah serta belum bisa memberikan informasi sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai atau bisa diterima oleh pengguna laporan keuangan dengan baik.

#### 4.3.2 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2)

**Tabel 4.7 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2)**

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel X2										$\Sigma$ Skor	Mean
	STS		TS		N		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X2.1	2	2	8	16	12	36	24	96	44	220	370	4,11
X2.2	8	8	17	34	15	45	23	92	27	135	314	3,49
X2.3	19	19	13	26	14	42	24	96	20	100	283	3,14
X2.4	15	15	16	32	17	51	17	68	25	125	291	3,23
X2.5	11	11	12	24	19	57	23	92	25	125	309	3,43
X2.6	13	13	12	24	18	54	20	80	27	135	306	3,40
X2.7	2	2	8	16	18	54	20	80	27	135	287	3,19
X2.8	7	7	10	20	21	63	26	104	26	130	324	3,60
X2.9	21	21	23	46	11	33	19	76	16	80	256	2,84
X2.10	15	15	17	34	16	48	22	88	20	100	285	3,17
X2.11	6	6	5	10	20	60	21	84	38	190	350	3,89
X2.12	11	11	10	20	19	57	24	96	26	130	314	3,49
X2.13	5	5	9	18	23	69	26	104	27	135	331	3,68
X2.14	11	11	11	22	17	51	27	108	24	120	312	3,47
X2.15	19	19	18	36	11	33	25	100	17	85	273	3,03
<b>Rata-Rata Variabel X2</b>												<b>3,41</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4.7 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut responden yang memberikan pendapat nya melalui kuesioner mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada kota Semarang yakni di beberapa SKPD Kota Semarang sudah dapat mengungkapkan laporan keuangan yang jujur tanpa ada ditutup-tutupi, dapat menyajikan informasi secara terbuka, pada instansi kota Semarang sudah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang sesuai instruksi pemerintah pusat dalam mewujudkan visi dan misi kinerja instansi pemerintah daerah.

#### 4.3.3 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)

**Tabel 4.8 Deskripsi Persepsi Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)**

Indikator	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y										Σ Skor	Mean
	STS		TS		N		S		SS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Y1	5	5	8	16	17	51	29	116	31	155	343	3,81
Y2	11	11	17	34	20	60	22	88	20	100	293	3,26
Y3	15	15	18	36	14	42	25	100	18	90	283	3,14
Y4	15	15	12	24	18	54	24	96	21	105	294	3,27
Y5	5	5	7	14	23	69	22	88	33	165	341	3,79
Y6	5	5	9	18	24	72	29	116	23	115	326	3,62
Y7	14	14	19	38	16	48	21	84	20	100	284	3,16
Y8	9	9	11	22	17	51	31	124	22	110	316	3,51
Y9	9	9	10	20	18	54	29	116	24	120	319	3,54
<b>Rata-Rata Variabel Y</b>												<b>3,46</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4.8 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut responden yang memberikan pendapat nya melalui kuesioner mengenai kinerja instansi pemerintah daerah pada kota Semarang yakni telah dilakukan kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja instansi pemerintahan yang jelas untuk meningkatkan nilai keberhasilan suatu kegiatan di instansi. Pada setiap instansi sudah melakukan pengecekan tiap-tiap kegiatan yang sedang berjalan atau yang sedang dilaksanakan.

#### 4.4 Teknik Analisis

##### 4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data

###### a. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Penelitian dikatakan valid atau tidak apabila pernyataan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang telah diisi oleh para responden pada lembaran kuesioner. Pengujian validitas dengan menggunakan SPSS, nilai validitas ditunjukkan pada kolom (*corrected item*). Jika angka korelasi lebih besar daripada ( $r$ -hitung,  $r$ -tabel) maka akan dapat dikatakan *valid*.

Pada penelitian ini *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  yakni jumlah sampel ( $df$ ) =  $90-2$  maka dapat diperoleh angka 88 dengan menggunakan

tingkat signifikan 5% atau 0,05. Didapatkan r-tabel yakni 0,2072 dibulatkan menjadi 0,207. Ada beberapa kriteria dalam pengujian validitas:

- a. Apabila nilai dari r-hitung > r-tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner hasilnya valid.
- b. Apabila nilai dari r-hitung < r-tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner hasilnya tidak valid.

Berikut ini adalah tabel data hasil uji validitas dari beberapa variabel:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Sig. (2-tailed)	R-hitung	R-Tabel	Kesimpulan
<b>X1 (Sistem Akuntansi Keuangan)</b>				
X1.1	0,000	0,368	0,207	Valid
X1.2	0,001	0,346	0,207	Valid
X1.3	0,000	0,399	0,207	Valid
X1.4	0,002	0,321	0,207	Valid
X1.5	0,001	0,334	0,207	Valid
X1.6	0,000	0,384	0,207	Valid
X1.7	0,003	0,315	0,207	Valid
X1.8	0,000	0,404	0,207	Valid
X1.9	0,001	0,348	0,207	Valid
X1.10	0,001	0,343	0,207	Valid
X1.11	0,002	0,323	0,207	Valid
X1.12	0,000	0,375	0,207	Valid
X1.13	0,000	0,416	0,207	Valid
X1.14	0,001	0,341	0,207	Valid
<b>X2 (Akuntabilitas Laporan Keuangan)</b>				
X2.1	0,001	0,330	0,207	Valid
X2.2	0,003	0,311	0,207	Valid
X2.3	0,000	0,394	0,207	Valid
X2.4	0,004	0,301	0,207	Valid
X2.5	0,000	0,375	0,207	Valid
X2.6	0,003	0,311	0,207	Valid
X2.7	0,000	0,376	0,207	Valid
X2.8	0,003	0,311	0,207	Valid
X2.9	0,000	0,401	0,207	Valid
X2.10	0,001	0,332	0,207	Valid

X2.11	0,003	0,311	0,207	Valid
X2.12	0,000	0,409	0,207	Valid
X2.13	0,002	0,322	0,207	Valid
X2.14	0,001	0,346	0,207	Valid
X2.15	0,000	0,436	0,207	Valid
<b>Y (Kinerja Instansi Pemerintah Daerah)</b>				
Y1	0,000	0,411	0,207	Valid
Y2	0,000	0,458	0,207	Valid
Y3	0,001	0,330	0,207	Valid
Y4	0,007	0,284	0,207	Valid
Y5	0,001	0,348	0,207	Valid
Y6	0,000	0,364	0,207	Valid
Y7	0,000	0,369	0,207	Valid
Y8	0,000	0,413	0,207	Valid
Y9	0,000	0,472	0,207	Valid

Sumber: Output SPSS lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk semua indikator pada variabel penelitian ini adalah *valid*. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi seluruh indikator variabel mempunyai nilai  $0,000 < 0,05$  serta untuk nilai  $R_{hitung} > 0,207$ .

#### **b. Hasil Uji Reliabilitas**

Menurut (Sugiyono, 2017), menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel yang dinyatakan reliabel harus harus melebihi nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Sedangkan nilai  $\alpha < 0,60$  teridentifikasi ada beberapa jawaban tanggapan responden yang tidak konsisten dan harus dibuang dengan melihat satu per satu jawaban tanggapan responden yang tidak konsisten (Ghozali, 2018).

Dari hasil tanggapan jawaban responden terdapat beberapa responden yang

menjawab secara tidak konsisten dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat dua (3) variabel yang dijawab dengan tidak konsisten yakni variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2), Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y). Responden yang menjawab secara tidak konsisten jika ada item penyerapan anggaran dan kondisi keuangan anggaran dijawab dengan skala 1 dan skala 5, maka responden yang menjawab seperti ini harus dibuang seperti contoh di buku SPSS (Ghozali, 2018). Pada X1 dengan variabel sistem akuntansi keuangan daerah ada 79 responden menjawab secara tidak konsisten, X2 dengan variabel akuntabilitas laporan keuangan ada 78 responden menjawab secara tidak konsisten, dan Y dengan variabel kinerja instansi pemerintah daerah ada 65 responden menjawab secara tidak konsisten. Berikut tabel hasil penelitian dari uji reliabilitas:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,749	Reliable
Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2)	0,686	Reliable
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	0,501	Reliable

Sumber: Output SPSS Lampiran 4

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki *cronbach's alfa*  $0,749 > 0,60$  yang dinyatakan reliabel. Variabel akuntabilitas laporan keuangan memiliki  $N=12, df = n-2 (12-2)$  yakni 10 dengan hasil *cronbach's alfa*  $0,686 > 0,60$  yang dinyatakan reliabel. Variabel kinerja instansi pemerintah daerah menghasilkan data tidak reliabel jika tetap menggunakan perbandingan dengan alfa. Agar data menjadi reliabel dan dapat digunakan penelitian selanjutnya, pada penelitian ini

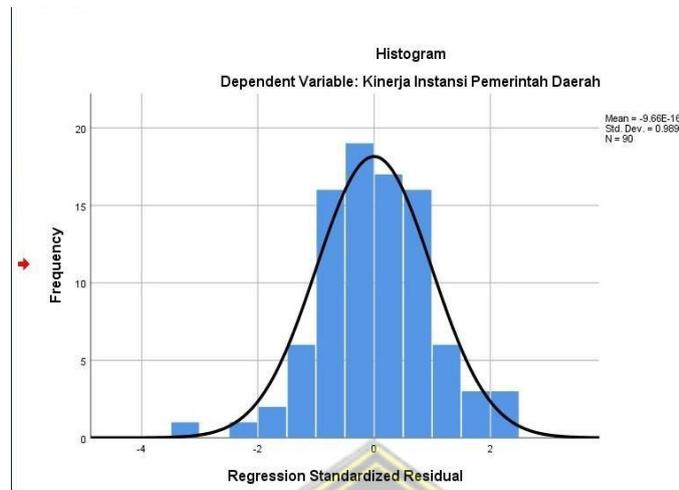
akan dilakukan *system drop out* yaitu Y2,Y3,Y4,Y5,Y7,Y8,Y9 terhadap pernyataan yang memiliki nilai *cronbach's alpa if item deleted* tertinggi, maka menggunakan perbandingan dengan r-tabel yakni  $n=25$ ,  $df n-2 (25-2) = 23$  yang menghasilkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel} 5\%$  yaitu  $0,501 > 0396$  yang dinyatakan reliabel (Janna, 2019).

#### 4.4.2 Uji Asumsi Klasik

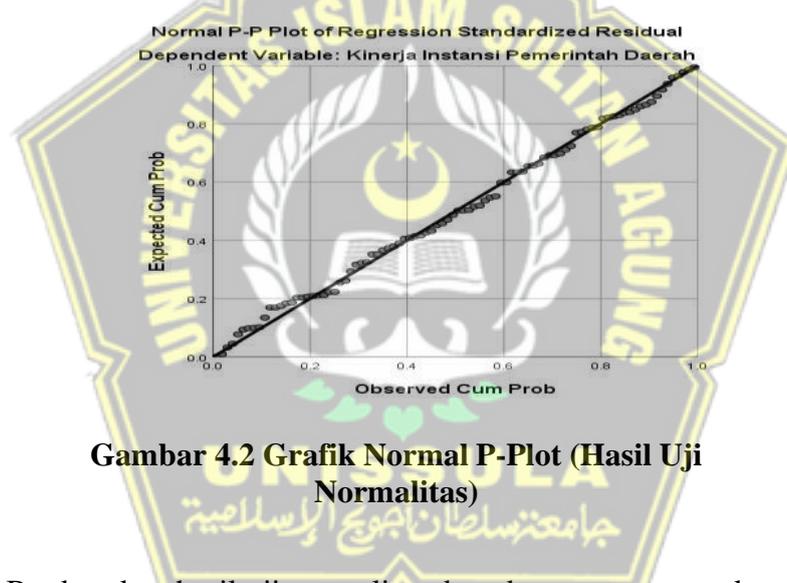
Uji Asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square (OLS)*. Asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali I. , 2016), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.



**Gambar 01 Grafik Histogram (Hasil Uji Normalitas)**



**Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot (Hasil Uji Normalitas)**

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik yakni grafik histogram dan normal p-plot pada SPSS Statistik 26. Grafik histogram menunjukkan bahwa garis kurva berbentuk lonceng di tengah sedangkan grafik batang semuanya berada dalam garis kurva tersebut. Pada uji analisis grafik histogram tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Grafik normal p-plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu data dinyatakan berdistribusi dengan normal.

Selain dengan uji grafik histogram dan uji normal p-plot, uji normalitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal, tetapi apabila nilai signifikan nya  $< 0,05$  maka data tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Berikut tabel *one-sample Kolmogorov-smirnov* test pada SPSS Statistik 26.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)**

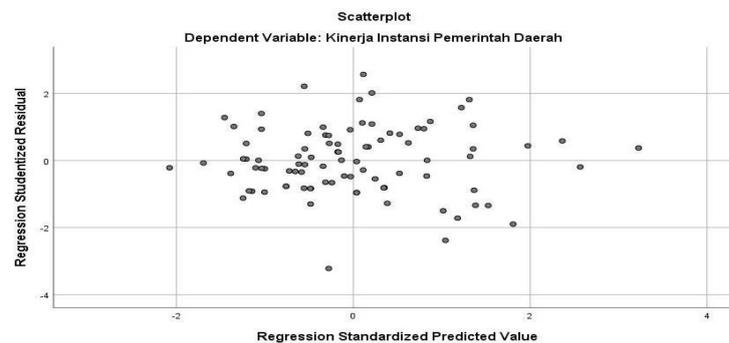
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		90
Normal Parameter <sup>a,b</sup>	Mean	0,000000
	Std. Deviation	4,28439144
Most Extreme Difference	Absolute	0,056
	Positive	0,037
	Negative	-0,056
<i>Test Statistic</i>		0,056
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>		0,20 <sup>c,d</sup>

Sumber: Output SPSS, Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Test Statistic kolmogorov-smirnov* yakni 0,056 dan *Asymp.Sig (2-tailed)* yakni 0,200  $> 0,05$ . Jadi pada uji ini tidak dapat menolak  $H_0$  yang dapat menyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

#### a. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penguji ini menggunakan uji scatterplot, pada grafik scatter plot dapat dilihat di antara suatu nilai variabel yang ada kaitan dengan ZPRED dan SRESID maka bisa menemukan apakah terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 03 Grafik Scatterplot (Hasil Heterokedastitas)**

Berdasarkan dari hasil gambar grafik scatterplot dalam pengujian heteroskedastisitas pada SPSS Statistics 26 pada gambar 4.3 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik distribusi secara acak atau tidak berada pada sumbu X dan Y, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, kesimpulannya tidak ada gangguan sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel independen nya. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas yakni dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF pada setiap variabel independen. Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka data bebas dari gejala multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang ada pada gambar di bawah ini:

**Tabel 4.12 Hasil Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,875	1,142	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	0,875	1,142	

Sumber: Output SPSS, Lampiran 5

Berdasarkan dari hasil tabel 4.12, *collinearity statistic* dalam pengujian uji multikolinieritas pada SPSS Statistic 26 diatas, menunjukkan bahwa untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar  $0,875 > 0,1$  dan hasil nilai VIF yaitu  $1,142 < 10$  yang dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Serta variabel akuntabilitas laporan keuangan memiliki nilai *tolerance* sebesar  $0,875 > 0,1$  dan hasil nilai VIF nya  $1,142 < 10$ . Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel-variabel yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan uji yang menyangkut lebih dari satu variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila variabel bebas hanya satu maka uji/ analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana, namun apabila variabel bebasnya lebih dari satu maka uji / analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear berganda, data yang digunakan biasanya berskala interval / drasio. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda yang akan dijelaskan melalui tabel:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandarized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	21,337	2,908	7,338	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,077	0,051	1,499	0,137
Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2)	0,118	0,081	2,323	0,022

Sumber: Output SPSS, Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut membuktikan koefisien  $\beta$  adalah bentuk suatu persamaan regresi yang dirumuskan yakni:

$$Y = 21,337 + 0,077 X_1 + 0,118 X_2 + e$$

Berdasarkan rumus persamaan di atas sehingga yang menjadi pedoman guna diinterpretasikan adalah:

1. Nilai *constant* sebesar 21,337 dengan nilai positif dan signifikan  $0,000 < 5\%$ , artinya jika semua variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas laporan keuangan) dianggap tetap atau konstan maka sistem akuntansi keuangan bernilai positif (baik).
2. Koefisien variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,077 dengan nilai positif dan signifikan  $0,137 > 5\%$  maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah Kota Semarang belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Koefisien variabel akuntabilitas laporan keuangan sebesar 0,118 dengan nilai positif dan signifikan  $0,022 < 5\%$  itu artinya penerapan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menilai kinerja instansi pemerintah daerah kota Semarang dan penerapan akuntabilitas laporan keuangan Kota Semarang sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada.

#### 4.4.4 Hasil Uji *Goodness of Fit*

##### 1. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja instansi pemerintah daerah). Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$  dan melihat nilai signifikansinya. Nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat dari nilai *degree of freedom*  $df_1$  dan  $df_2$ .

**Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	F	Sig.
1	Regression	112,534	2	5.770	0,004 <sup>b</sup>
	Residual	848,354	87		
	Total	960,889	89		

Sumber: Output SPSS, Lampiran 7

Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan ( $\alpha$ ) yakni 5% atau 0,05 dan *degree of freedom* (df) dengan rumus df yakni pembilang =  $k-1$ , sedangkan penyebut =  $n-k$  dengan keterangan  $n$ = jumlah sampel dan  $k$  = jumlah seluruh variabel penelitian. Jadi nilai df pembilang =  $3-1 = 2$  sedangkan nilai df penyebut =  $90-3 = 87$  dengan nilai  $f$ -tabel yakni 3,10.

Hasil perhitungan pada tabel 4.14 diatas, mendapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,570 atau nilai probabilitas (sig) sebesar 0,004. Berikut penjelasan perhitungan untuk  $F_{hitung}$  dengan probabilitas (sig) dari tabel:

$H_0$ : Sistem akuntansi keuangan daerah (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Semarang (Y).

$H_a$ : Sistem akuntansi keuangan daerah (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2), secara Bersama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota

Semarang.

Dari hasil pengujian simultan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  untuk variabel X1-X2 yakni  $5,570 < 3,10$  yakni **F-tabel** maka dapat diartikan hipotesis ditolak. Sedangkan dilihat dari hasil perhitungan **probabilitas (sig)** memperoleh nilai sebesar  $0,004 > 0,05$  sehingga dapat diartikan berpengaruh dan hipotesis diterima. Sehingga diartikan hasil uji simultan “semua variabel independen/ bebas (variabel X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen/ terikat (variabel Y) pada satuan kerja perangkat daerah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda ini layak digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut (Sujarweni 2015), Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared*.

**Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (R2)**

Model	R	R. Square	Adjusted R. Square	Std. Error
1	0,342 <sup>a</sup>	0,117	0,097	3,12269

Sumber: Output SPSS, Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R square* sejumlah 0,097 dibulatkan menjadi 10% terlihat dari variabel-variabel kinerja instansi pemerintah daerah Kota Semarang yang dapat dijelaskan oleh 2 variabel

yakni sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, sisa dari *adjusted R Square* yakni 0,097 dibulatkan menjadi 10% ( $100\% - 10\% = 90\%$ ). Dengan demikian hasil koefisien determinasi diatas 10%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan dapat mempengaruhi variabel kinerja instansi daerah Kota Semarang yang sangat besar.

#### 4.4.5 Hasil Uji Hipotesis

##### 1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Metode uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji signifikan parameter individual (uji T). Uji T statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dan nilai signifikan nya.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)**

Variabel	Unstandardized Coefficients	Bunyi Hipotesis	Sig	Keterangan	Kesimpulan
	B				
(Constant)	21,337		0,000		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,077	Positif	0,137	Positif dan tidak signifikan	Ditolak
Akuntabilitas Laporan Keuangan	0,118	Positif	0,022	Positif dan signifikan	Diterima

Sumber: Output SPSS, Lampiran 8

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil uji parsial (Uji T) pada tabel 4.16 diatas:

##### a. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi

### **Pemerintah Daerah Kota Semarang**

Hasil perhitungan dari tabel 4.16 diatas, mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,077 dan bernilai positif dengan sig  $0,137 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama (H1)** yakni berpengaruh positif tidak signifikan, hipotesis ditolak. Jadi, hipotesis pertama (H1): “Sistem akuntansi keuangan daerah (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang”, tidak terbukti kebenarannya, penelitian ini tidak berhasil dan harus uji kembali pada variabel tersebut.

### **b. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang**

Hasil perhitungan dari tabel 4.16 diatas, mendapatkan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,118 dan bernilai positif dengan sig  $0,022 < 0,05$  disimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H2)** yakni berpengaruh positif signifikan, hipotesis diterima. Sehingga hipotesis kedua (H2): “Akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang”, terbukti kebenarannya dan variabel tersebut berhasil digunakan dalam penelitian ini.

## **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.5.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistik 26 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **Hipotesis pertama** dapat disimpulkan bahwa **ditolak** yakni sistem akuntansi keuangan daerah (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang”. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa adanya sistem akuntansi

keuangan daerah meningkat dengan baik, maka akan dapat meningkatkan juga pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah Kota Semarang yang lebih baik. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari sistem akuntansi keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah melibatkan dua pihak yakni pemerintah belum bisa bertindak sebagai agen yang diinginkan dan masyarakat juga belum bertindak sebagai principal karena masyarakat belum bisa mempercayai dan melihat hasil kinerja yang nyata dari pegawai pemerintahan yang apabila kinerja pemerintah sudah nyata maka masyarakat dapat mudah mempercayai kinerja pemerintah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Lestari, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah studi kasus organisasi perangkat daerah Kabupaten Kendal. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arum, R., 2017) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

#### **4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang menggunakan SPSS Statistik 26 dalam penelitian menunjukkan bahwa hasil **Hipotesis pertama** dapat disimpulkan bahwa **diterima** yakni akuntabilitas laporan keuangan (X2) berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang”. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas laporan keuangan meningkat dengan baik, maka akan dapat meningkatkan juga pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah Kota Semarang yang lebih baik. Pengaruh signifikan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari akuntabilitas laporan keuangan yang memiliki peranan sangat penting.

Dilihat dari sisi teori keagenan dapat menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi yang logis mengenai adanya hubungan antara agen dan principal.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arum, R., 2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah studi kasus organisasi perangkat daerah Kabupaten Kendal.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di SKPD Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari Hasil Hipotesis

Hipotesis ditolak, artinya sistem akuntansi keuangan daerah (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari akuntabilitas laporan keuangan yang memiliki peranan sangat penting. Sedangkan untuk Hipotesis diterima, artinya akuntabilitas laporan keuangan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dari sistem akuntansi keuangan daerah yang memiliki peranan sangat penting.

2. Dari Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Koefisien variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,077 dengan nilai positif dan signifikan  $0,137 > 5\%$  maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah Kota Semarang belum

bisa mendukung sepenuhnya terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan untuk koefisien variabel akuntabilitas laporan keuangan sebesar 0,118 dengan nilai positif dan signifikan  $0,022 < 5\%$  itu artinya penerapan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti akuntabilitas laporan keuangan akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menilai kinerja instansi pemerintah daerah kota Semarang dan penerapan akuntabilitas laporan keuangan Kota Semarang sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada.

## 5.2 Implikasi

Implikasi merupakan sebuah korelasi dari teoritis dan praktis dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis yakni perkembangan teori-teori tentang “Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Semarang”, sedangkan implikasi praktis yakni orang-orang yang sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Semarang.

### 1. Implikasi Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan penelitian selanjutnya mengenai kontribusi bagi perkembangan teori-teori yang dapat digunakan untuk mendasar bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Pada penelitian berkaitan dengan teori agency karena pemerintah yang bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintahan yang harus menetapkan strategi tertentu agar

dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal atau masyarakat. Masyarakat menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut sebagai salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan terhadap masyarakat yang baik. Kesimpulannya yaitu apabila kinerja pemerintahan baik, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

## 2. Implikasi Praktis

### a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah ada 2 peran yang mempengaruhi yakni sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

### b. Bagi Pemerintah

Sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat dijadikan acuan bagi SKPD terutama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjadi yang lebih baik dan bertanggungjawab lebih baik.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, masih ada beberapa keterbatasan pada saat melakukan penyebaran kuesioner oleh peneliti, berikut penjelasannya:

1. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 1 hipotesis yang ditolak yakni sistem akuntansi keuangan daerah (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang dan ada juga 1 hipotesis yang diterima yakni akuntabilitas laporan keuangan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y) pada SKPD Kota Semarang.

2. Penyebaran kuesioner menurut peneliti, penyebaran kuesioner masih kurang efektif dan efisien dikarenakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 cara. Dengan begitu penyebaran kuesioner melalui *google form* dan lembar kuesioner susah untuk mendapatkan tingkat respon yang baik, dikarenakan sebagian besar dari pegawai nya kurang memahami pengaruh dari sistem akuntansi dan juga yang mengisi kuisisioner nya campuran bukan yang bagian akuntansi nya langsung.

#### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini masih ada kekurangan menurut peneliti, maka peneliti berharap penelitian saat ini dan saat akan mendatang dapat lebih memperbaiki dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Berikut cara dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang:

1. Hipotesis yaitu hanya sebuah dugaan sementara, maka hipotesis harus dapat dinyatakan dalam bentuk ungkapan yang nyata dan sesuai dengan rumusan masalah. Hipotesis pertama ditolak, diartikan ada cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima atau tidak cocok dengan data empiris. Sedangkan hipotesis kedua diterima, diartikan bukti data statistik yang menyimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima atau cocok dengan data empiris. Jadi, kesimpulan dari hipotesis penelitian tersebut yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan lebih data-data empiris yang sesuai agar hasil hipotesis penelitian yang akan datang dapat diterima semua dan sesuai data-data empiris yang ada.
2. Diharapkan penelitian yang akan mendatang bisa menggunakan teknik

pengumpulan data dengan wawancara, agar data yang didapatkan dari responden merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, R. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas SKPD Kota Cimahi). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 66, 37–39.
- Antika, Z. Y. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15 (2), 212-232.
- Auditya, Lucy Husaini, L. (2019). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan. *Jurnal Fairness*, 3(5), 21–41.
- Darmawan, F. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(2004), 6–25.
- Edowati, Mikael, Herminawati, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Eliana. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh). *KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*, 8(1), 1–14.
- Fahd, E. M. (2019). Pengaruh Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survei Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Bandung Raya). *Skripsi (S1)*, 12(6), 1–12.
- Fitria Asri Kurnia. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas Kabupaten Bandung Barat). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivarietas dengan Program IBM SPSS*.

Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hakim, L. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR – Study & Accounting Research* /, XIII(2), 1–13.
- Hesti, M. M. (2016). Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah, dan sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. In *Jurnal Akuntansi*, 5(13), 1-116
- Husna Ade, Maryam, I. S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214.
- Janna, N. M. (2019). Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan spss. *Jurnal Statistika Terapan*, 6(9), 1–12.
- Lestari, U. P. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Lewerissa, N., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Good Governance, Audit Kinerja, Dan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(10), 1–17.
- Murniati, S. (2020). Pengaruh Pengawasan, Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(4), 1–13. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154>
- Ni Made Kertiani, Ni Putu Ayu Kusumawati, P. C. A. (2020). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 20(8), 204–222.
- Nugrahaeni Yunita, Roni, H. Z. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 21(1) 1–9.
- Nurul, F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(13), 1–94

- Priscilla, Taufeni, A. A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 99–111.
- Rofifah, D (2020). Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Document*, 4(6), 12–26.
- Saifrizal, M. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 8(16), 9.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, CV.
- Usman, P. L. (2018). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *European Journal of Endocrinology*, 171(6), 1–78.

